

BULETIN RINGKAS

STATISTICAL & POLICY BRIEF

Berjuang Bersama Bagi Pembangunan Bangsa yang Berkualitas

Pendidikan dan Dunia Kerja

Kesenjangan ketrampilan atau *skill-gap* antara sisi penawaran dengan sisi permintaan tenaga kerja merupakan salah satu sebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terutama pengangguran orang muda (Gropello 2011). Padahal *skill* atau keterampilan adalah bekal utama bagi anak muda untuk bekerja. Penguasaan skill adalah suatu proses yang dinamis sejak masa anak-anak dan masa sekolah. Namun, masa transisi dari sekolah menuju dunia kerja belum banyak dipahami oleh para perencana pembangunan maupun para pengguna jasa tenaga kerja.

Tingkat pendidikan berdampak pada tinggi rendahnya upah yang diterima. Untuk mengatasi permasalahan pekerja muda berpendidikan rendah, perlu adanya rancangan kebijakan yang sesuai kebutuhan dari sisi penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi perbedaan tingginya perbedaan upah pekerja, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Selamat membaca!

Isu Terkini:

Transisi dari Sekolah Menuju Dunia Kerja

Oleh:
Sri Moertiningsih Adioetomo

2

Upah Pekerja Muda di Indonesia

Oleh:
Sonny Harry B. Harmadi

8

Fokus Perhatian Berbagai Info Terkini

Penilaian kinerja setahun Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi fokus perhatian banyak pihak, dan tak luput pendapat masyarakat secara umum.

Masyarakat sangat berharap bahwa pemerintahan yang baru akan menjalankan program kerja yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa aktivitas BPS yang penting antara lain adalah kegiatan analisis lanjutan hasil ST2013 Subsektor, Analisis Tematik yang dikerjakan beberapa universitas, dan persiapan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016).

Semoga!

Buletin Ringkas
Statistical & Policy Brief

Diterbitkan oleh:
Forum Masyarakat
Statistik

Penanggung Jawab:
Prof. Dr. Bustanul Arifin
dan
Anggota FMS

Sekilas info dari Redaksi:

- Publikasi Analisis Subsektor Sensus Pertanian (ST2013) : November 2015
- Publikasi Analisis Tematik Sensus Pertanian (ST2013) : November 2015

Transisi dari Sekolah Menuju Dunia Kerja

:: studi eksploratif di Lampung dan Jawa Barat

Oleh

Sri Moertiningsih Adioetomo¹

Catatan: tulisan ini merupakan sebagian dari hasil penelitian eksploratif mengenai kesempatan kerja bagi anak muda 15-29 tahun yang berjudul 'Transisi dari Sekolah Menuju Dunia Kerja – school to work transition'. Penelitian dilakukan oleh tim yang terdiri dari penulis bersama dengan Diah Widarti, Tara H Suprobo dan Alvin Pratama 2015. Penelitian ini dilaporkan ke TNP2K dan PRSF dan didukung oleh AUSAID/DFAT.

Kesenjangan ketrampilan atau *skill-gap* antara sisi penawaran dengan sisi permintaan tenaga kerja merupakan salah satu sebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terutama pengangguran orang muda (Gropello 2011). Padahal *skill* atau keterampilan adalah bekal utama bagi anak muda untuk bekerja. Penguasaan skill adalah suatu proses yang dinamis sejak masa anak-anak dan masa sekolah. Namun masa transisi dari sekolah menuju dunia kerja belum banyak dipahami, baik oleh perencana pembangunan maupun para pemakai jasa tenaga kerja. Banyak pertanyaan diajukan mengenai bagaimana proses anak muda mendapatkan pekerjaan selepas sekolah? Atau berapa lama harus menunggu sampai mendapatkan pekerjaan? Selama waktu menunggu sampai mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, apa saja yang mereka kerjakan? Beberapa peneliti yang telah mulai memperhatikan hal ini antara lain Bowlby (2000), Sziraczki and Reerink (2004), ILO (2006). Tetapi tersedianya kerangka konsep yang lebih komprehensif dikembangkan oleh ILO baru pada tahun 2009. Konsep ILO ini mengategorikan anak muda dalam masa transisi dari sekolah menuju dunia kerja menjadi (1) yang telah melampaui masa transisi; (2) yang sedang mengalami transisi; (3) yang belum mulai masa transisi. Namun, sebelum menjelaskan konsep ILO ada baiknya dipahami apa saja kegiatan anak muda di pasar kerja, seperti Gambar 1.

“Untuk mengurangi angka pengangguran, diperlukan adanya bekal pendidikan dan keterampilan yang cukup dan sesuai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja”

Gambar 1. Pemetaan Kegiatan Anak Muda di Pasar Kerja.

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--|
| Angkatan kerja | | Bukan angkatan kerja | |
| Bekerja Sektor formal | | | |
| Bekerja di sektor informal | Sedang Bersekolah | | |
| | Bekerja | Tidak bekerja | |
| Menganggur | | | |

Sumber: disadur dari World Bank 2006.

World Bank (2006) memetakan anak muda² menjadi apakah dia sudah masuk ke pasar kerja, baik sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau yang disebut angkatan kerja; dan mereka yang bukan angkatan kerja. Yang sudah bekerja di sektor formal atau informal. Yang bekerja di sektor formal umumnya bekerja penuh waktu, sedangkan yang bekerja di sektor informal bisa bekerja sambil bersekolah. Bagian lain dari angkatan kerja tetapi belum bekerja adalah mereka yang aktif mencari pekerjaan alias menganggur.

¹ Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok dan Anggota Forum Masyarakat Statistik
² Pembagian siapa yang disebut anak muda tergantung dari tujuan memakainya. World Bank (2006) memakai usia 15-24 tahun, sedangkan ILO (2009) memakai 15-29 tahun. Adioetomo dk. (2015) memakai 15-29 tahun untuk lebih mendekati definisi dari UU 2009 tentang kepemudaan (16-30 tahun).

Adapun yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, Ibu Rumah Tangga, atau yang tidak 'ngapa-ngapain'. Yang terakhir ini dalam literatur sering disebut NEET (*Not in Education, Not in Employment and not doing any Training*). Kondisi NEET ini banyak menyita perhatian, ILO (2009), World Bank (2006), Sziraczki and Reerink (2004). Apakah kondisi ini termasuk yang disebut sebagai 'putus asa' (*discourage workers*), diuraikan dibawah.

Definisi Transisi Dari Sekolah Menuju Dunia Kerja

Umumnya pengertian transisi dari sekolah ke dunia kerja menyangkut saat anak muda lepas dari sekolah (apakah setelah lulus atau putus sekolah) sampai mendapatkan pekerjaan pertama kali. Hal ini tentunya menyangkut pendidikan sebagai bekal memasuki dunia kerja serta kegiatan-kegiatan lain selama transisi sampai mendapatkan pekerjaan pertama. ILO menambahkan dengan persyaratan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan reguler dan memuaskan (ILO, 2009). Tentunya konsep memuaskan sangat subyektif menurut si individu sendiri, dan juga belum tentu pekerjaan pertama kali yang diperoleh sudah merupakan pekerjaan yang sifatnya reguler, artinya pekerjaan yang permanen dan mempunyai kontrak. ILO membagi masa transisi anak muda ke dunia kerja menjadi: (1) sudah melalui transisi; (2) sedang mengalami transisi; (3) belum mulai transisi.

Untuk anak muda 15-29 tahun yang sudah bekerja (sudah melampaui masa transisi) dikategorikan lagi apakah mereka mengalami transisi singkat, menengah dan transisi panjang. Masa transisi singkat umumnya diartikan bagi pekerja yang langsung mendapat pekerjaan segera setelah lepas sekolah; mereka yang menciptakan pekerjaan sendiri tetapi belum memuaskan karena masih temporer atau tanpa kontrak; termasuk juga yang menganggur tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan masa transisi menengah adalah yang sudah bekerja secara temporer dan sudah berlangsung antara satu sampai dua tahun; atau yang tadinya menganggur atau lamanya mencari kerja antara 3 sampai satu tahun, atau yang sama sekali tidak mencari kerja tetapi akhirnya mendapat pekerjaan. Terakhir adalah masa transisi yang terlalu lama yakni waktu menunggu yang telah lebih dua tahun, sambil menciptakan pekerjaannya sendiri atau mendapatkan pekerjaan dari orang lain yang sifatnya temporer.

Panjang pendeknya masa transisi yang dilalui anak muda sampai memperoleh pekerjaan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Umumnya masa transisi yang singkat atau dikatakan sukses menjalani masa transisi adalah mereka yang setelah menyelesaikan sekolah langsung mendapatkan pekerjaan yang bersifat reguler, dengan kontrak dan gaji yang memadai. Ini merupakan

refleksi dari keberhasilan menerapkan bekal pengetahuan maupun keterampilan yang diperoleh dari sekolah. Namun tidak demikian halnya dengan anak muda yang terpaksa putus sekolah, masa transisi yang pendek belum tentu mencerminkan suksesnya melalui masa transisi, karena mereka harus mencari kegiatan ekonomi seadanya untuk memperoleh penghasilan. Mereka ini terpaksa harus bekerja untuk menopang hidupnya.

Anak muda yang sedang dalam masa transisi (*in transition*) adalah mereka yang masih mencari pekerjaan (menganggur), yang sudah bekerja memperoleh gaji atau upah tetapi tanpa kontrak atau yang bekerja secara temporer, yang semuanya tentu tidak memuaskan. Termasuk disini adalah juga mereka yang menciptakan pekerjaannya sendiri tetapi tidak memuaskan. Sedangkan anak muda yang dikategorikan belum mulai masa transisi, adalah mereka yang masih bersekolah. Tetapi ada kelompok lain yang tidak bersekolah tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Ini yang secara internasional dinamakan kelompok NEET.

Pemetaan semacam ini yang diikuti dengan hasil empiris akan memudahkan pengambil kebijakan untuk mengembangkan program yang tepat sasaran. Bagi anak muda, masa transisi yang terlalu lama akan menorehkan luka yang mendalam, bagi anak muda itu sendiri maupun terhadap masyarakat keseluruhan. Dilain pihak transisi yang sukses akan membawa kehidupan yang baik yang dicita-citakan, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan kemiskinan. Masa transisi yang dibekali dengan ketrampilan akan dapat mempersempit kesenjangan (*skill-gap*) dan menurunkan Rasio Gini (World Bank Indonesia 2015).

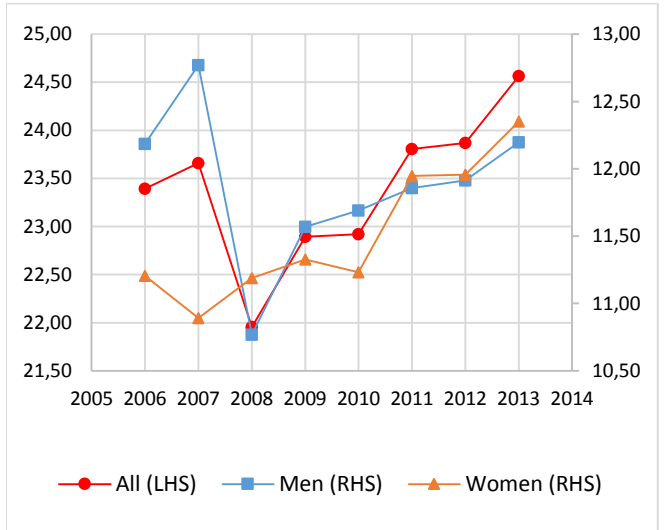
Hasil empiris

Dalam memahami kondisi anak muda 15-29 tahun dalam mengarungi masa transisi dari sekolah menuju dunia kerja, Adioetomo, Widarti, Suprobo dan Pratama (2015) menerapkan dua pendekatan. Yang pertama analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang hasilnya mencerminkan keadaan secara nasional, tetapi tidak mampu menangkap keadaan lapangan mengenai apa yang terjadi setelah anak muda lepas dari sekolah. Sehingga dilakukan studi kualitatif di dua tempat di sebuah kota Lampung yang merupakan daerah pertanian dan sebuah kabupaten di Jawa Barat yang merupakan daerah industri baru. Pendalaman dengan aplikasi kerangka konsep ILO mengenai transisi dari sekolah menuju dunia kerja dilaksanakan dengan FGD terhadap 53 informan anak muda di kedua daerah tersebut.

Gambaran Anak Muda dalam Transisi dari Sekolah Menuju Dunia Kerja dari Sakernas.

Analisis Sakernas memakai kerangka pikir Geoff Bowlby (2000) yang lebih sederhana dari konsep ILO yang mengategorikan kegiatan anak muda menjadi: (1) bersekolah; (2) bersekolah sambil bekerja; (3) bekerja saja; (4) tidak bersekolah, tidak bekerja, tidak mencari kerja dan tidak sedang mengikuti pelatihan (NEET).

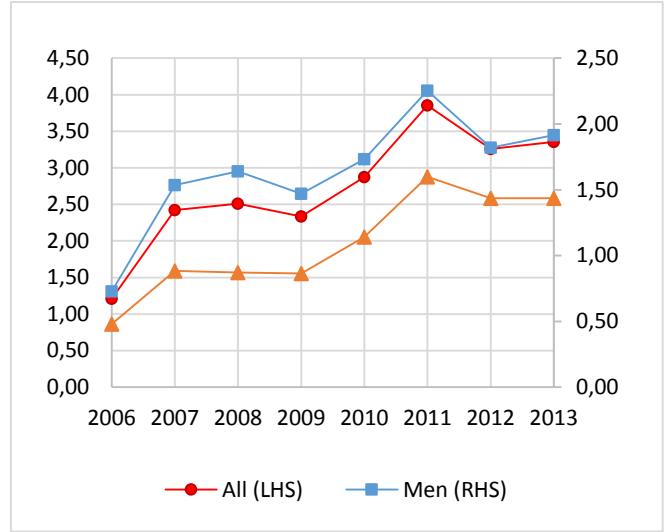
Gambar 2. Persentase Anak Muda 15-29 Tahun yang Masih Bersekolah.



Sumber : Diolah dari berbagai seri Sakernas

Gambar 2 menunjukkan tren anak muda yang belum mulai transisi ke dunia kerja. Kecuali untuk tahun 2008, terlihat adanya peningkatan persentase anak muda yang bersekolah. Meskipun masih sekitar 25 persennya, terlihat ada kecenderungan anak muda menghabiskan lebih banyak waktunya di sekolah dan menunda dimulainya masa transisi menuju dunia kerja. Hal ini memungkinkan mereka lebih mempunyai waktu mempersiapkan diri mengarungi dunia kerja. Pola yang sama ditemukan antara laki-laki maupun perempuan, bahkan mulai tahun 2011 persentase perempuan muda yang berada di sekolah lebih tinggi dari yang laki-laki. Ini agaknya merupakan fenomena yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara Global (World Bank 2012).

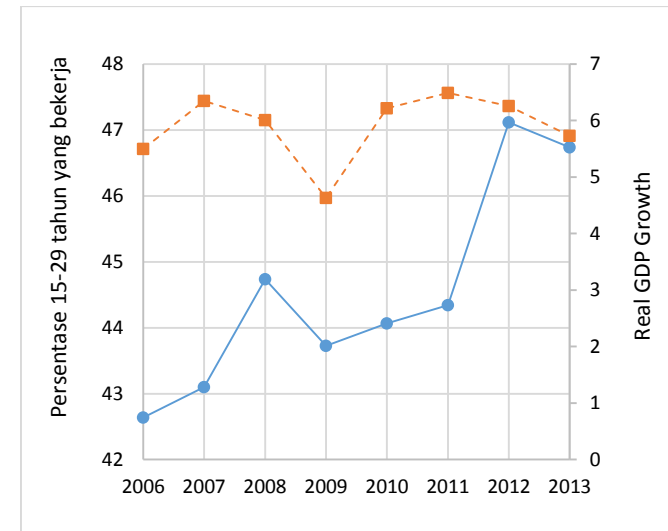
Gambar 3. Persentase Anak Muda 15-29 Tahun yang Bekerja Sambil Bersekolah



Sumber : Diolah dari berbagai seri Sakernas

Selanjutnya Gambar 3 memperlihatkan kecenderungan anak muda yang bersekolah sambil mulai bekerja. Umumnya kondisi ini mencerminkan usaha anak muda untuk tetap bersekolah dan menanggung biaya sekolah yang makin tinggi. Sisi positifnya adalah bahwa anak muda ini mulai dapat memahami situasi dalam dunia kerja, sehingga merupakan persiapan yang baik untuk nantinya menapaki dunia kerja sesungguhnya. Meskipun prevalensi anak muda yang bersekolah sambil bekerja ini masih rendah sekitar 4 persen dari seluruh anak muda 15-29 tahun, peningkatan persentase dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kesadaran anak muda mempersiapkan diri mengarungi masa transisi ke dunia kerja.

Gambar 4. Persentase Anak Muda 15-29 Tahun yang Bekerja dan Pertumbuhan PDB

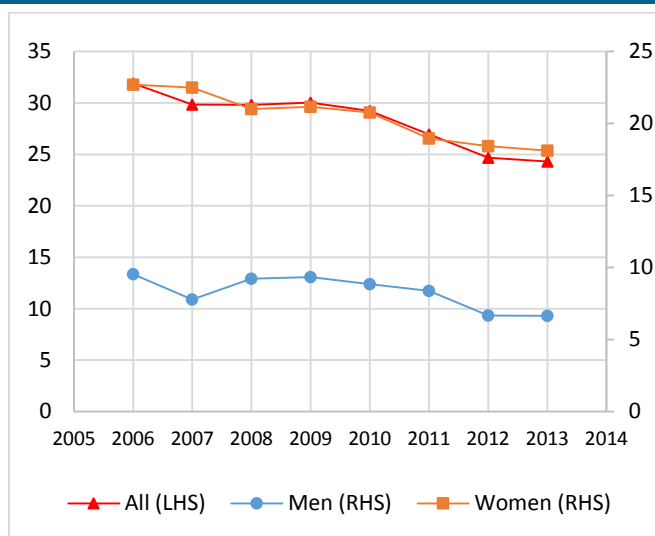


Sumber : Diolah dari berbagai seri Sakernas

Selanjutnya Gambar 4 menunjukkan bahwa persentase anak muda yang bekerja. Dari gambar ini terlihat kecenderungan peningkatan persentase anak muda 15-29 tahun yang sudah bekerja. Peningkatan terjadi dari sekitar 43 persen menjadi 47 persen tahun 2013. Artinya hampir separuh anak muda (termasuk usia 15-19 tahun yang seharusnya masih bersekolah) sudah masuk pasar kerja.

Mengacu konsep Bowlby maupun ILO, anak muda ini sudah menyelesaikan transisi dari sekolah ke dunia kerja, meskipun belum dapat menggambarkan apakah mereka ini mempunyai pekerjaan reguler, mempunyai kontrak dan/ atau memuaskan. Disandingkan dengan tren PDB riil agaknya dinamika pemuda-pemudi dalam pasar kerja mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi, dimana kelihatan bahwa apabila ekonomi membaik persentase anak muda yang bekerja juga meningkat, atau sebaliknya. Hal ini terutama terlihat pada tahun 2009, yang mungkin merupakan dampak krisis keuangan global, meskipun Indonesia tidak terlalu menderita karenanya.

Gambar 5. Persentase Anak Muda 15-29 Tahun yang Tidak Bersekolah dan Tidak Bekerja



Sumber : Diolah dari berbagai seri Sakernas

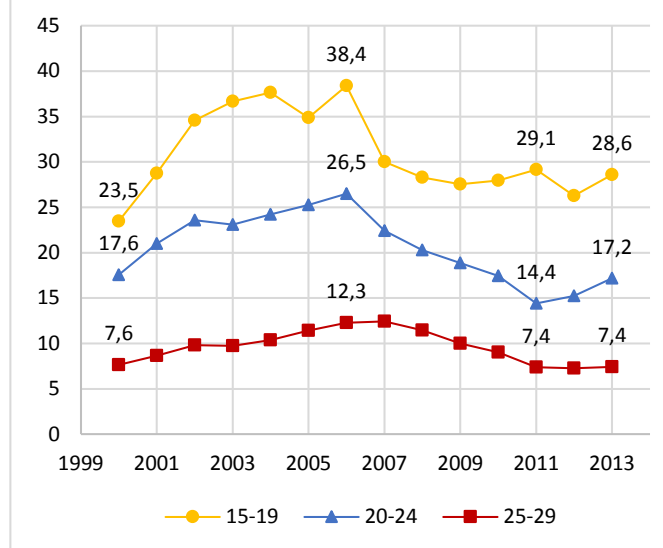
Gambar 5 menunjukkan persentase anak muda NEE, tidak sekolah tidak bekerja dan tidak sedang dalam pelatihan. Ini suatu fenomena yang banyak memicu perhatian tentang siapa dan mengapa kondisi seperti ini terjadi. Meskipun persentase dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan, tetapi pada tahun 2013 persentasenya masih tinggi, yakni sekitar 25 persen, atau satu diantara empat anak muda 15-29 tahun disekolah adalah kelompok NEE.

Suryadarma, Suharyadi dan Sumarto (2007) menganggap bahwa mereka ini adalah anak muda yang putus asa atau 'discourage workers'. Dengan persepsi bahwa mungkin

anak muda ini sudah berupaya mencari pekerjaan tetapi belum mendapat kesempatan sehingga berhenti berupaya. Kemungkinan masa transisi yang terlalu akan menghilangkan harapan untuk memperoleh pekerjaan dan menyebabkan keputusasaan. Tetapi lain halnya Adioetomo, Widarti, Suprobo dan Pratama (2015) yang melakukan dekomposisi NEE menurut jenis kelamin, menemukan bahwa ternyata sebagian besar anak muda NEE ini adalah perempuan (Gambar 5). Dalam hal ini, data NEE adalah mereka yang bukan angkatan kerja yang tidak bersekolah, jadi termasuk Ibu Rumah Tangga dan anak muda yang lainnya. Dan bukan pensiunan karena usia sudah diatas 30 tahun. Tradisi di Indonesia banyak anak perempuan yang bekerja di dalam rumah, membantu mengasuh adiknya selagi orangtuanya bekerja, membantu berjualan di warung rumah, membuat kerajinan (*home industry*) atau berjualan *on-line*. Mereka ini, beranggapan bahwa yang dinamakan bekerja adalah pekerjaan di luar rumah (di kantor, pabrik dll.). Sehingga waktu petugas survei menanyakan, para wanita muda ini menyatakan diri sebagai 'tidak bekerja', padahal senyatanya melakukan suatu kegiatan. Baik mendapat penghasilan dalam bentuk uang ataupun non-uang. Dari penemuan ini maka kemudian dipertanyakan apakah 'persepsi putus asa' itu benar adanya, karena permasalahannya lebih terletak pada konsep bekerja, yang luput diperbaiki.

Tinggi rendahnya tingkat pengangguran anak muda menggambarkan adanya kesulitan atau kendala dalam mengarungi transisi selepas sekolah menuju dunia kerja. Gambar 6 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran anak muda dari tahun ke tahun amat tinggi dan tidak menunjukkan adanya penurunan. Dari analisis Adioetomo dkk. (2015) ditemukan bahwa tingkat pengangguran anak muda 15-29 tahun 5 kali tingkat pengangguran orang dewasa. Tingkat pengangguran yang sangat tinggi pada anak usia 15-19 tahun adalah yang paling tinggi yakni 28,6 persen tahun 2013. Ini merupakan refleksi tentang betapa sulitnya para remaja, yang seharusnya masih berada disekolah, memperoleh pekerjaan. Dapat dipastikan bahwa mereka ini remaja putus sekolah, dan mengarungi masa transisi tanpa bekal pendidikan yang cukup apalagi ketrampilan ataupun sesuatu kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Dikhawatirkan bahwa apabila mereka menganggur terlalu lama bakal menjadi orangtua yang tidak akan mampu memenuhi hak-hak dasar anak-anaknya kelak. Dan kelak dikemudian hari tidak dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Oleh karena diperlukan upaya untuk memberikan kesempatan kedua untuk menyelesaikan pendidikan, atau memberikan pelatihan yang sesuai dengan kapasitasnya agar bisa menjadi warganegara yang mandiri dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 6. Tingkat Pengangguran Anak Muda 15-19, 20-24 Dan 25-29 Tahun



Sumber : Diolah dari berbagai seri Sakernas

Dari Gambar 6 ini terlihat bahwa tingkat pengangguran menurun sejalan dengan peningkatan usia. Ini mungkin menunjukkan keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi (usia 25-29 tahun) dan menjalani masa transisi dengan sukses. Sebaliknya bagi yang putus sekolah sebelum usia 25-29 tahun, mereka terpaksa menciptakan pekerjaannya sendiri. Ini memerlukan penelitian lebih lanjut secara rinci diperlukan untuk mengklarifikasi hal ini.

Gambaran Transisi dari Sekolah Menuju Unia Kerja Konsep ILO 2009, Hasil FGD

Anak muda yang sudah menyelesaikan transisi, sudah bekerja.

Aplikasi konsep ILO (2009) dilakukan dengan FGD bagi anak muda lulusan SMK yang sudah bekerja di salah satu Kota di Lampung dan di daerah industri baru di Jawa Barat. Anak-anak muda yang sudah bekerja di dua area studi mengemukakan bahwa mereka cukup bahagia dan merasa optimis karena masih muda dan merasa mempunyai kesempatan yang lebih luas. Namun ada perbedaan antara kedua area tersebut. Anak muda yang bekerja di sektor terkait dengan pertanian di Lampung, mempunyai masa transisi yang pendek, yakni mendapat pekerjaan segera setelah lulus dari SMK pertanian, bahkan banyak diantaranya sebelum lulus SMK telah ditawarkan bekerja. Hal ini terjadi karena Kepala Sekolah (dari sebuah SMK Pemerintah), sangat aktif dan berinovasi membuka hubungan dengan sekolah vokasi di luar negeri, mengirim guru-guru meningkatkan pendidikan ke S2. Hubungan dengan calon pemberi kerja, yang berasal dari industri pertanian disekitarnya sangat baik, sering mengundang calon pemberi kerja untuk memberikan pengarahan kepada anak didiknya. Cara pandang anak didiknya diubah,

bahwa 'menjadi petani tidak selalu dikaitkan dengan kemiskinan'. Dan ini memotivasi anak didik untuk belajar dengan baik, tidak hanya memperdalam ketrampilan teknis tetapi juga memperhatikan 'soft skill' seperti 'budi pekerti' yang disisipkan di semua mata pelajaran. Bobot pelajaran yang bersifat praktek lebih besar dari bobot akademis. Para informan lulusan sekolah ini merasakan bahwa yang diajarkan disekolah sangat berguna dalam pekerjaan. Di sini terkesan adanya 'link and match' antara pendidikan dengan dunia kerja.

Dalam diskusi FGD dengan anak-anak pekerja ini, terkesan bahwa mereka cukup 'puas' dengan kondisi pekerjaan saat ini. Anak-anak ini memang benar-benar disiapkan untuk mengarungi masa transisi ke dunia kerja secara sukses. Namun demikian, untuk kemudian hari, terkesan bahwa anak-anak ini belum memikirkan masa depan selanjutnya. Apakah mereka akan bertambah maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan pasar kerja yang sangat dinamis. Apakah nantinya hasil kerja mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau rumah tangganya dikemudian hari? Ketiadaan visi tentang masa depan, serta belum terpikirkannya pembinaan karir akan menyebabkan anak-anak ini stagnan dan berisiko mengalami kebosanan yang berakibat pada penurunan produktifitas.

Lain halnya dengan kondisi anak muda yang bekerja di salah satu daerah industri Jawa Barat. Daerah industri ini merupakan daerah peralihan dari perdesaan ke daerah urban-industrial. Di sini terdapat Perda yang mengharuskan industri menyerap tenaga kerja lokal. Namun kenyataannya, anak lokal tidak dapat tertampung karena kualitasnya, baik dari sisi pendidikan, ketrampilan maupun sikap dan perilaku yang belum siap menjadi pekerja di kawasan industri. Sehingga, kebutuhan tenaga kerja muda untuk industri diisi oleh pekerja dari daerah lain. Pekerja migran dari daerah lain ini merasa optimis tentang masa depan mereka, meski memahami harus disertai dengan kerja keras. Dari kenyataan bahwa banyak diantara mereka yang bekerja didaerah tersebut bukan pekerjaan pertama kali selepas sekolah, maka pekerjaan yang mereka dapat bukan transisi langsung (*direct transition*) dan masih belum tentu bahwa pekerjaan yang mereka dapat saat penelitian adalah pekerjaan yang memuaskan. Dibandingkan dengan pekerja muda dari Lampung anak muda migran ini lebih antusias dalam menghadapi masa depannya melalui perjuangan. Jadi teori '*migrant selectivity*' memang terbukti, bahwa migran dibanding non-migran mempunyai antusiasme kerja dan ketahanan/ survival hidup yang lebih tinggi.

Yang memprihatinkan adalah anak muda lokal di daerah industri baru ini. Alasan tidak terserap dalam dunia kerja bukan hanya ketiadaan ketrampilan, melainkan juga

perilaku yang tidak siap memenuhi tuntutan pekerjaan di industri modern. Sekolah SMK di daerah ini dikelola oleh swasta. Anak didiknya berasal dari wilayah sekitarnya yang masih bersifat perdesaan. Kepala Sekolah SMK ini mengalami kesulitan untuk menertibkan kehadiran para anak didik, kesulitan menegakkan peraturan yang wajib diikuti anak didik dan segala kewajiban yang harus diikuti anak didik. Banyaknya kejadian putus sekolah, sampai hampir 40 persen, mengindikasikan bahwa anak-anak ini tidak siap menghadapi peralihan kebiasaan dari cara pandang dan perilaku tradisional ke perilaku yang dituntut industri modern disekitarnya. Yang diikuti adalah gaya hidup yang 'nyaman tanpa bersusah payah' seperti mempunyai motor, main *gadget* dan merokok. Anak muda macam ini jumlahnya cukup banyak, sehingga ada salah satu NGO yang peduli akan hal ini dengan melakukan pelatihan yang dinamakan '*Equipped Youth*', yang mengajarkan 'kecakapan hidup' (*life Skill*), hal-hal sederhana seperti bagaimana membuat lamaran kerja, bagaimana bersikap sewaktu menghadapi wawancara dengan calon pemberi kerja dll. Dan ternyata ini pelatihan seperti ini cukup berhasil, karena sehabis mengikuti pelatihan, sebagian besar akhirnya terserap di industri.

Anak Muda yang Masih Dalam Transisi dari Sekolah ke Dunia Kerja

Menurut konsep ILO anak muda yang masih dalam transisi ke dunia kerja, termasuk yang menganggur. Tetapi di lapangan amat susah mencari anak muda yang benar-benar menganggur, sehingga area penelitian terpaksa dipindah untuk mendapat informan FGD. Di Lampung kami akhirnya menemukan sekelompok pemulung, dan di Jawa Barat sekelompok anak muda yang bekerja secara kasual, tambal ban, buruh cuci, membantu orang tua buka warung. Baik dari Lampung maupun Jawa Barat informan kami ini hanya tamat SD bahkan ada beberapa yang tidak tamat. Adapun kesamaan antar keduanya adalah bahwa mereka sulit untuk dapat memahami pertanyaan peneliti, seperti misalnya apa harapan untuk ke depannya? Bahkan pertanyaan yang sederhana pun sukar dimengerti. Kesulitan dasarnya terletak pada kemampuan berkomunikasi yang sangat rendah. Padahal komunikasi merupakan kompetensi utama yang dituntut dalam pekerjaan dan merupakan bagian dari '*generic skill*' yang diutarakan oleh Gropello (2011). Tidak heran kalau anak-anak semacam ini sangat terkendala dalam mendapatkan pekerjaan.

Hanya dengan upaya keras dalam bertanya tentang apa yang diinginkan untuk masa depannya, yang perempuan menyatakan ingin buka salon kalau punya modal, atau kalau punya ijazah bisa bekerja di toko. Sedangkan informan dari Jawa Barat kebanyakan ingin menjadi karyawan di pabrik garmen atau otomotif. Namun setelah

ditanya lebih lanjut, mereka tidak mempunyai gambaran tentang syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di pabrik. Kesulitan keuangan menyebabkan mereka putus sekolah, tetapi umumnya mereka bercita-cita agar anaknya nanti mempunyai kehidupan yang lebih baik. Namun orang tua dari para informan ini umumnya beranggapan bahwa sekolah hanya untuk bisa membaca dan menulis, tidak perlu mempunyai ijazah. Para pemulung di daerah Lampung bekerja dalam kelompok yang diorganisir oleh yang mereka namakan 'bos'. Penghasilan keseharian sangat terbatas kalau boleh dikatakan kurang untuk makan sehari-hari. Jadi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan anak tidak pernah terpikirkan. Kekurangan biaya hidup ditutupi dengan meminjam dari koordinator pemulung.

Yang Belum Mulai Masa Transisi: Masih Bersekolah

Mereka yang belum mulai transisi usianya masih muda 16-19 tahun dan masih sekolah. Tetapi mereka ini bahkan sudah bisa membedakan kaitan antara pendidikan dan dunia kerja."kalau ingin langsung kerja setelah SMK, praktek dalam kelas harus lebih banyak, sedangkan kalau mau meneruskan kuliah sebaiknya memilih jurusan yang lebih banyak teori". Artinya mereka sudah mengerti harus memilih SMK atau SMA. Juga menarik bahwa anak muda yang masih sekolah ini mengakui bahwa karakter juga diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kesuksesan ditentukan melalui belajar tekun, bekerja keras dan disiplin diri adalah kunci menuju sukses.

Semua anak yang menjadi informan penelitian ini lebih dari separuhnya ingin menjadi wirausaha. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa mereka ini enggan berpartisipasi dalam pelatihan. Umumnya para muda ini ingin langsung bekerja, padahal kapasitas mereka sangat rendah.

Kesan yang Diperoleh dari Studi Eksploratif Ini

Bahwa peranan sekolah sangat diharapkan untuk membantu anak didiknya dalam menapaki transisi ke dunia kerja. Ini terutama untuk anak-anak yang ingin bekerja segera setelah lulus sekolah menengah. Kebijakan 12 tahun wajib belajar harus dilaksanakan dengan tuntas, karena kemampuan berkomunikasi dengan baik hanya diperoleh kalau lulus SMA. Untuk anak muda yang mengalami masa transisi pendek, yakni bekerja setelah lulus SMK, sebaiknya diikuti dengan pembinaan untuk memudahkan mereka beradaptasi dengan kemajuan karena globalisasi dengan segala tantangannya.

Soft skill atau lebih tepatnya *life skill* (kecakapan hidup) perlu dikembangkan sejak dini bahkan sejak dalam keluarga. Anak usia sekolah 15-19 tahun diberikan

kesempatan kedua (*second chance*) untuk kembali ke sekolah. Namun hal ini hanya akan berhasil apabila orang tuanya diberdayakan agar anaknya dibebaskan dari pekerjaan menambah penghasilan. Pelatihan keterampilan dan kompetensi (*technical skill*) sangat diperlukan, meskipun banyak anak muda yang enggan mengikuti pelatihan semacam ini. Pemerintah dan para mitra hendaknya memfasilitasi dan mengadakan pendampingan untuk anak muda yang berbakat dan ingin membuka usahanya sendiri

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait, diperoleh informasi bahwa sudah banyak kementerian, lembaga bahkan pihak swasta yang mempunyai program pembinaan anak-muda. Namun agaknya masih diperlukan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat untuk terciptanya 'satu visi dan arah pembinaan anak-muda, khususnya pendampingan selama masa transisi dari sekolah menuju dunia kerja'. Apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; atau Kementerian Tenaga Kerja, atau Kementerian Pemuda dan Olahraga? Masih belum jelas siapa yang seharusnya bertanggung jawab tentang hal ini.



Daftar Pustaka:

- Adioetomo, Sri Moertiningsih, Diah Widarti, Tara B Suprobo dan Alvin Pratama, 2015. *Youth Employment: Transition from School to Work, an Explorative Study*. A report submitted to TNP2K, PRSF, DFAT.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih, Horst Posselt dan Ariane Utomo. 2014. *Youth in Indonesia. UNFPA Indonesia Monograph Series: No.2*. Jakarta, UNFPA.
- Bowlby, Geoff. 2000. *The School-to-Work Transition. Perspectives, Spring 2000 /43*.
- Gropello, Emanuela; Kruse, Aurelien; and Tandon, Prateek. 2011. *Skills for the Labor Market in Indonesia : Trends in Demand, Gaps, and Supply*. World Bank.
- ILO. 2006. *Pasar Tenaga Kerja Orang Muda Indonesia dan Dampak Putus Sekolah Dini serta Pekerja Anak*. ILO Jakarta.
- ILO. 2009. *ILO School-to-work transition survey: a Methodological guide. Module 1. Basic Concept, roles and implementation process*. ILO, Geneva.
- Suryadarma, Daniel, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto 2007. 'Measuring Unemployment in Developing Countries: The Case of Indonesia'. *LABOUR* 21 (3) 541-562. 2007
- Sziraczki & Reerink 2004. *School-to-work transition survey (ISTWS) Jakarta, Central Java, and NTT*. ILO 2004
- World Bank. 2006. *World Development Report 2007. Development and the Next Generation*.
- World Bank, 2011. *World Development Report 2012. Gender Equality and Development*. World Bank. Washington
- Utomo, Ariane, Peter McDonald, Ana Reimondos, Terrence Hull and Iwu Utomo. 2014. *What happen after you drop out? Transition to adulthood among early school leavers in urban Indonesia*. *Demographic Research*. Volume 30, Article 41, pages 1189-1218. April 2014.

Upah Pekerja Muda di Indonesia

Oleh : Sonny Harry B. Harmadi

Salah satu permasalahan pembangunan Indonesia saat ini ialah meningkatnya ketimpangan pendapatan rumah tangga. Koefisien Gini sisi pengeluaran di Indonesia terus meningkat setiap tahun, dari 0,35 di tahun 2008 menjadi 0,41 di tahun 2014. Perlu dipahami bahwa sebagian besar sumber pengeluaran rumah tangga berasal dari *labor income*, dimana keterbatasan kepemilikan aset menyebabkan *non-labor income* tidak memiliki peran penting bagi pendapatan rumah tangga. Maknanya jelas bahwa sebagian besar pendapatan rumah tangga bergantung pada pendapatan dari bekerja. Adanya peningkatan ketimpangan dalam pendapatan bekerja jelas berimplikasi terhadap ketimpangan pengeluaran rumah tangga. Pendapatan dari bekerja yang dimaksud di sini adalah upah.

Upah merupakan komponen yang paling cocok untuk mengukur ketimpangan pendapatan (Goldberg & Pavcnik, 2007). Oleh karenanya, ketimpangan upah dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Menurut World Bank (2014), Koefisien Gini upah meningkat dari 0,41 ke 0,45 antara tahun 2001 hingga 2012, dan dari 0,39 ke 0,43 untuk upah pekerja formal saja. Tren serupa berlaku jika kita hanya menghitung untuk kelompok pekerja penuh waktu (bekerja lebih dari 35 jam per minggu). Berdasarkan rasio persentil 80 dengan persentil 20 (P_{80}/P_{20}) untuk upah bersih pekerja per bulan, ketimpangan upah meningkat dari 3,33 pada tahun 1999 menjadi 3,90 pada tahun 2013¹.

Ketimpangan upah untuk kelompok penduduk muda (umur 15-24 tahun) di Indonesia juga menarik untuk dianalisis, karena selain jumlahnya yang cukup besar (sekitar 24 persen dari penduduk usia kerja), juga karena kelompok penduduk muda ini sebagian mengalami transisi dari sebelumnya sekolah menjadi bekerja (*transition from school to work*). Proporsi yang masuk angkatan kerja sebanyak 46 persen dan yang bekerja sebanyak 78 persen. Kontribusi kelompok pekerja muda dalam ketimpangan upah jelas menarik untuk diperhatikan.

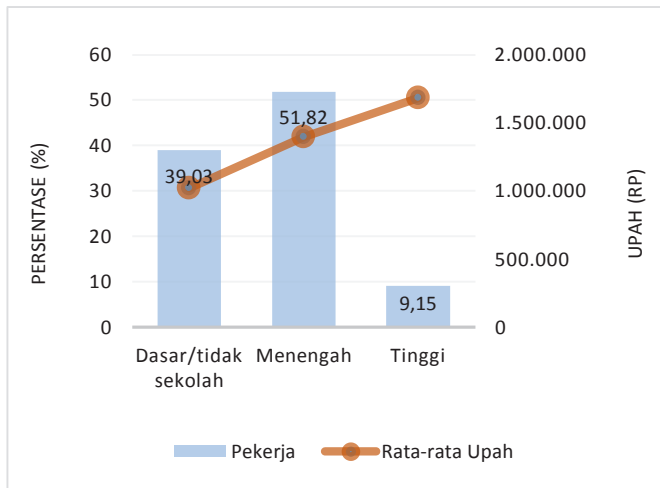
Menurut Mincer (1974) dalam Mincer (1988) bahwa upah pekerja utamanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan umur. Karena pendidikan merupakan aspek penting atas upah yang diterima, kebijakan pendidikan harus dapat memastikan bahwa mereka yang meninggalkan bangku sekolah dan masuk ke pasar kerja, harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja muda yang mengalami transisi dari sekolah ke dunia kerja berhasil memperoleh pekerjaan yang layak di pasar kerja. Rantai sebab-akibat ini juga dapat dianalisis secara terbalik. Maksudnya bahwa keberhasilan para pekerja muda di pasar kerja akan memberikan insentif bagi para orang tua untuk menginvestasikan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Gambar 7 di bawah ini menjelaskan kondisi pekerja muda yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja muda dengan pendidikan dasar/tidak sekolah sekitar 39,03 persen, pendidikan menengah 51,82 persen dan pendidikan tinggi 9,15 persen. Rata-rata upah pekerja dengan pendidikan dasar/tidak sekolah sebesar Rp 1.020.976,-, pendidikan menengah Rp 1.394.550,- dan pendidikan tinggi Rp 1.681.877,-. Sehingga rata-rata upah pekerja dengan pendidikan menengah 36,59 persen lebih tinggi dari pekerja dengan pendidikan dasar/tidak sekolah. Sedangkan rata-rata upah pekerja dengan pendidikan tinggi 64,73 persen lebih tinggi dari pekerja berpendidikan dasar/tidak sekolah.

1 Dihitung dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik tahun 1999 dan 2013.

“Perbedaan pendidikan antara pekerja menyebabkan adanya kesenjangan nilai upah yang diterima, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesenjangan pendapatan.”

Gambar 7. Persentase Pekerja Muda dan Rata-rata Upah Pekerja Muda Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Data Sakernas 2013 BPS (Data diolah)

Untuk mendorong produktivitas pekerja muda berpendidikan rendah agar dapat memperoleh upah lebih tinggi, perlu dirancang secara khusus kebijakan (sisi penawaran) yang sesuai kebutuhan mereka. Kebijakan ini lebih diarahkan untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan minat bakat pekerja muda dan sesuai kebutuhan pasar kerja. Sedangkan bagi pekerja muda dengan pendidikan lebih tinggi, perlu dipastikan bahwa keterampilan (*skill*) yang mereka dapatkan di sekolah memang sudah tepat. Jenis keterampilan yang tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dapat dikurangi, serta dirancang suatu kebijakan untuk membangun kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia usaha.

Berdasarkan data Sakernas 2013, upah yang didapatkan pekerja berpendidikan menengah cenderung lebih tinggi sebesar 23 persen dari pendidikan dasar, sedangkan upah yang diperoleh pekerja berpendidikan tinggi (diploma ke atas) 60 persen lebih tinggi dari pendidikan dasar². Analisis tersebut hanya berlaku untuk kelompok pekerja muda (15-24 tahun). Ini menunjukkan bahwa perbedaan upah yang tinggi antara pekerja muda berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah dapat memperbesar ketimpangan pendapatan. Apalagi faktanya, rumah tangga yang berpendapatan tinggi cenderung mampu menyekolahkan anak mereka lebih tinggi dibanding rumah tangga berpendapatan rendah dan berdampak pada ketimpangan kesejahteraan anak-anak mereka di masa depan.

Selain itu, perlu juga diamati dampak mobilitas pekerja muda terhadap perubahan upah, mengingat kelompok pekerja ini cenderung memiliki mobilitas yang tinggi

2 Hasil model ekonometri dengan mengacu pada model Mincer (1974). Variabel terikat: logaritma natural upah bersih per bulan, variabel bebas: umur, umur2, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, pengalaman, pengalaman2, daerah, tingkat pengangguran kabupaten/kota.

di pasar kerja. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa mobilitas pekerja muda dengan pendidikan menengah (pindah kerja ke lapangan usaha yang berbeda), akan meningkatkan upahnya sebesar 21 persen lebih tinggi dibandingkan pekerja muda berpendidikan dasar. Sedangkan pekerja muda berpendidikan tinggi justru mengalami penurunan upah sebesar 1,8 persen dibandingkan mereka yang berpendidikan dasar³.

Hasil ini memberikan pandangan bahwa pekerja muda berpendidikan menengah paling fleksibel dan menguntungkan dalam melakukan mobilitas kerja dibanding kelompok pekerja muda berpendidikan rendah dan tinggi. Padahal mobilitas kerja dapat meningkatkan produktivitas. Mobilitas yang tidak menguntungkan bagi kelompok muda berpendidikan tinggi ini juga dapat diduga bahwa mereka memang tidak memiliki pilihan yang lebih baik lagi karena terbatasnya kesempatan kerja bagi pekerja muda berpendidikan tinggi.

Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa mobilitas pekerja muda sering terjadi akibat mereka sulit memperoleh pekerjaan yang sesuai keahlian dan minatnya, khususnya bagi yang berpendidikan tinggi. Akibatnya, mereka masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian dan menggantikan para *unskilled workers* yang sebelumnya menempati posisi itu. Para pekerja muda tersebut menghadapi risiko penurunan kelas (*declassament*), yakni memperoleh pekerjaan dengan kualifikasi keahlian yang lebih rendah. Isu mobilitas kerja merupakan salah satu perhatian dalam soal transisi dari sekolah ke bekerja.

Transisi dari sekolah ke bekerja (*school-to-work*) kini telah menjadi perhatian para *scholars* dan pembuat kebijakan. Konsep *school-to-work* mencakup sejumlah isu mengenai pendidikan, pekerjaan (*employment*), dan pelatihan (Ryan, 2001). Bagi negara-negara berkembang, seringkali sekolah dianggap tidak mampu menyiapkan para lulusannya untuk hidup dan bekerja. Sebuah sistem pendidikan yang baik harus mampu merancang kurikulum yang mendidik muridnya tentang pengetahuan dan cara berpikir praktis, serta keterampilan-keterampilan berperilaku (*behavioral skills*) yang dituntut oleh pasar kerja. Oleh karenanya, diperlukan suatu kombinasi yang tepat antara kurikulum akademis dan vokasional untuk meningkatkan kemampuan belajar para orang muda. Di samping itu, sebagai tambahan, diperlukan pula penguatan keterkaitan antara sekolah dengan kebutuhan pembangunan dimana sekolah itu berada. Dengan penguatan tersebut transisi sekolah-ke-bekerja akan lebih baik dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Keberhasilan reformasi ini ditentukan, selain oleh para guru yang berkualitas, juga oleh lingkungan sekolah

3 Model Heckman perubahan upah akibat mobilitas kerja tahun 2012 ke 2013.

yang aman, yang menjamin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya proses pembelajaran dengan baik.

Kita dapat belajar dari pengalaman negara lain yang memberikan porsi penting bagi pendidikan kejuruan (vokasional). Pengalaman di Jerman dan Jepang menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan salah satu solusi penting agar transisi sekolah ke bekerja dapat berjalan dengan baik. Jerman menerapkan program magang yang luas di berbagai sektor, sedangkan Jepang menerapkan jaringan perekrutan langsung dari sekolah ke *employer*.

Daftar Pustaka:

- Goldberg, P. K., & Pavcnik, N. (2007, Maret). *Distributional Effects of Globalization in Developing Countries*. *Journal of Economic Literature* XLV, page 39-82.
- Mincer, Jacob 1988. *Job Training, Wage Growth and Labor Turnover.* *NBER Working Papers 2690*, National Bureau of Economic Research.
- Mincer, Jacob dan Jovanovic, Boyan. 1981. *Labor Mobility and Wages*. *Studies in Labor Markets*, page 21 – 64. University of Chicago Press, ISBN: 0-226-72628-2
- Ryan, P. (2001). *The School-to-Work Transition: A Cross-National Perspective*. *Journal of Economic Literature*, page 34-92.
- World Bank. 2014. *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia*. Jakarta.

SNAPSHOT KEGIATAN FORUM MASYARAKAT STATISTIK

RAPAT PLENO III FORUM MASYARAKAT STATISTIK
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) METODE BARU
JAKARTA, 30 JULI 2015



FMS mengundang Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS pada rapat pleno III FMS untuk memaparkan metode baru penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemaparan IPM yang dihitung dengan metode baru ini dirasa perlu mengingat sejak tahun 2015, IPM telah diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dijadikan salah satu indikator target pembangunan yang menjadi acuan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan mendampingi indikator asumsi makro yang selama ini digunakan untuk merancang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan

dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. (UNDP).

Untuk mengukur tujuan itu, dipilih tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu: umur panjang dan sehat (*Longevity*) yang diwakilkan dengan angka harapan hidup, pengetahuan (*Knowledge*) yang diwakilkan dengan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas (AMH 15+) dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (MYS 15 tahun ke atas)

dengan bobot 2/3 untuk AMH 15+ dan 1/3 untuk MYS 15+, serta standard hidup layak (*Decent Living Standard*) yang menggunakan proksi pengeluaran rumah tangga yang disesuaikan. Agregasi penghitungan IPM menggunakan rata-rata hitung (*Arithmetic mean*) dengan bobot yang sama untuk masing-masing indikator.

Genap setelah 20 tahun kemudian yaitu pada tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan metodologi yang meliputi perubahan indikator dan perubahan metode agregasi dalam penghitungan IPM. Perubahan Indikator dilakukan pada Angka Melek Huruf yang digantikan Harapan Lama Sekolah (*Expected Year of Schooling*). Hal ini karena AMH dirasakan sudah hampir merata dicapai di seluruh dunia.

Perubahan metode dilakukan pada pergantian metode agregasi aritmetika menjadi metode agregasi *geometric*. Perubahan ini dilakukan karena metode agregasi aritmetika dinilai kurang tepat menggambarkan nilai dari indeks komposit yang dihasilkan disebabkan oleh kekurangan di satu dimensi dapat tertutupi oleh dimensi lain. Sebagai gantinya digunakan metode agregasi geometrik sehingga kekurangan di suatu dimensi akan mengurangi capaian pembangunan manusia secara umum.

Sejak awal dirilis, penggunaan metode baru penghitungan IPM ini sudah diwarnai kegaduhan-kegaduhan. Hal ini

tidak terlepas dari kurang sempurnanya dalam memahami angka IPM baru. Ditambah lagi, IPM di Indonesia merupakan data yang sensitif dan bersifat politis karena digunakan dalam komponen penentuan DAU.

Secara garis besar Penghitungan IPM metode baru berimplikasi pada terjadinya perubahan:

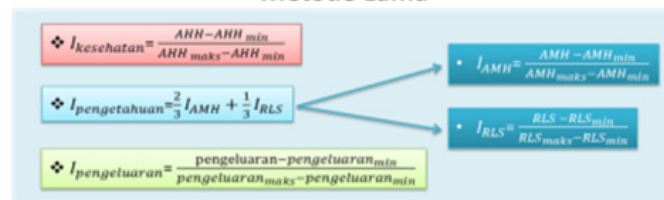
1. Level IPM: menjadi lebih rendah dibandingkan dengan metode lama
2. Peringkat IPM: terjadi perubahan peringkat meskipun pada hakikatnya tidak bisa diperbandingkan karena perbedaan indikator dan metodologi perubahan Level dan peringkat IPM.

Perubahan tersebut tidak perlu diperdebatkan sepanjang data dan proses perhitungan sudah sesuai dengan metode yang digunakan.

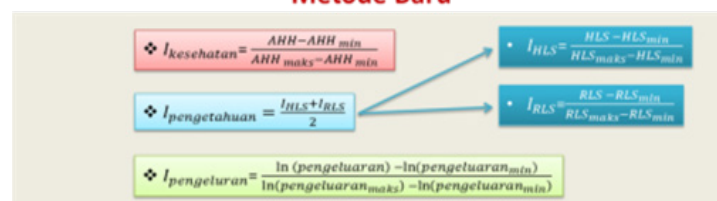
Namun demikian, perubahan level dan peringkat yang disebabkan oleh perubahan metode penghitungan IPM ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan oleh semua pihak. Karena angka IPM yang dihasilkan dengan penggunaan metode baru ini akan lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya di suatu wilayah. Artinya akan semakin memudahkan semua pemangku kepentingan dalam menelaah sebab-sebab tercapai atau tidaknya pembangunan yang diselenggarakan di masing-masing daerah.

| DIMENSI | METODE LAMA | | METODE BARU | |
|---------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | UNDP | BPS | UNDP | BPS |
| Kesehatan | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) | Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) |
| Pengetahuan | 1. Angka Melek Huruf (AMH) | 1. Angka Melek Huruf (AMH) | 1. Harapan Lama Sekolah (HLS) | 1. Harapan Lama Sekolah (HLS) |
| | 2. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) | 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |
| Standar Hidup Layak | Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita | Pengeluaran per kapita Disesuaikan | Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita | Pengeluaran per kapita Disesuaikan |
| Agregasi | Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$ | | Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$ | |

Metode Lama



Metode Baru



FORUM MASYARAKAT STATISTIK DALAM GAMBAR

RAPAT PLENO I FORUM MASYARAKAT STATISTIK
Pembentukan Kepengurusan dan Penyusunan Program Kerja FMS Periode 2015 – 2016
JAKARTA, 17 JUNI 2015



FORUM MASYARAKAT STATISTIK DALAM GAMBAR

RAPAT PLENO II FORUM MASYARAKAT STATISTIK
MEMBEDAH STATISTIK ANGKA RAMALAN PRODUKSI PANGAN
JAKARTA, 30 JULI 2015





Program Kerja FMS 2015-2016

- Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data
- Meningkatkan *coverage* melalui partisipasi responden (khususnya data perusahaan/*establishment*).
- Mediator dalam mengkomunikasikan data
- Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional dan daerah (Musrenbangnas dan Musrenbangda)
- Pembentukan klaster kerja

Pengurus dan Anggota FMS 2015-2016:

Pengarah:

Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD

Pengurus:

1. Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua)
2. Dr. Ir. Leonard V. H. Tampubolon, MA (Wakil Ketua I)
3. Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D (Wakil Ketua II)
4. Dr. Kecuk Suhariyanto (Sekretaris)

Anggota :

1. Prof. Dr. Adrianus Mooy
2. Kusmadi Saleh, MA
3. Prof. Dr. Insukindro
4. Dr. Sudarno Sumarto
5. Dr. Adi Lumaksono, MA
6. Dra. Rahma Iryanti, MA
7. Ir. Bambang Prijambodo, MA
8. Prof. Dr. Mohammad Arsjad Anwar
9. Prof. Dr. Bustanul Arifin
10. Prof. Mohamad Ikhsan, MA, Ph.D
11. Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc
12. Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi
13. Suharsono Sumantri, M.Sc, Ph.D
14. Prof. Dradjad Irianto
15. Dr. Sonny Harmadi
16. Iwan Gardono, Ph.D
17. Dr. Hari Wijayanto
18. Perry Warjiyo, Ph.D

Buletin Ringkas Statistical & Policy Brief

Diterbitkan oleh:
Forum Masyarakat Statistik



Forum Masyarakat Statistik

Sekretariat: Deputi Bidang Ekonomi Bappenas
Jln. Taman Suropati No. 2
Gedung Madiun Lantai 5
Jakarta 10310

Telp (+62 21) 31936207,
Fax 3145374

Email : fms2011_2014@yahoo.com
Web: <http://www.fms.or.id>